



Universitas
Harkat Negeri

MODUL PEMBELAJARAN: KEWARGANEGARAAN

SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar **Pendidikan Kewarganegaraan** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran Perguruan Tinggi yang menerapkan kurikulum berorientasi pada hasil (*Outcome-Based Education / OBE*).

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, bermoral, serta berintegritas tinggi. Di tengah dinamika era globalisasi, disrupsi digital, dan kompleksitas isu-isu sosial-politik, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian teknis profesional, tetapi juga kesadaran berbangsa dan bernegara yang mantap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku ajar ini terbagi ke dalam 14 Bab Utama yang menguraikan secara runut seluruh materi RPS, mulai dari konsep dasar hak dan kewajiban, kedudukan Pancasila, analisis isu korupsi dan radikalisme, hingga Wawasan Nusantara, Demokrasi Pancasila, serta Kebijakan Bela Negara. Setiap bab dilengkapi dengan Sub-CPMK, materi teoretis komprehensif, studi kasus kontekstual, ringkasan, dan soal latihan interaktif untuk mendorong pemikiran kritis serta kemampuan analisis mahasiswa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Universitas Harkat Negeri, Sekolah Vokasi, serta rekan-rekan dosen yang telah memberikan masukan bernilai dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini bermanfaat dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, adaptif, dan berjiwa nasionalis.

Slawi, September 2026

Prasetya Putra Nugraha, M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Peta Capaian Pembelajaran (OBE & Rubrik Evaluasi)	iv
Bab 1: Hakikat dan Konsep Dasar Kewarganegaraan	1
Bab 2: Pancasila sebagai Kedudukan & Dasar Negara	3
Bab 3: Konsep dan Implementasi Hak Warga Negara	5
Bab 4: Konsep dan Implementasi Kewajiban Warga Negara	7
Bab 5: Analisis Dampak dan Isu Korupsi di Indonesia	9
Bab 6: Akar Masalah Intoleransi dan Radikalisme	11
Bab 7: Strategi Komprehensif Pemberantasan Korupsi	13
Bab 8: Evaluasi Paruh Semester (UTS) & Panduan Portofolio	15
Bab 9: Strategi Penanganan Intoleransi & Deradikalisasi	16
Bab 10: Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	18
Bab 11: Demokrasi Indonesia: Konsep dan Implementasi	20
Bab 12: Pluralisme dan Toleransi Beragama di Indonesia	22
Bab 13: Peran Warga Negara dalam Perubahan Sosial	24
Bab 14: Partisipasi Publik dan Sistem Bela Negara	26
Daftar Pustaka	28

PETA KURIKULUM & EVALUASI OBE

Buku ajar ini dirancang dengan struktur *Outcome-Based Education (OBE)* yang mengintegrasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta Sub-CPMK secara terukur.

Peta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- **CPL-1:** Mampu bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berkontribusi dalam kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- **CPL-2:** Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, serta menaati hukum dan disiplin.
- **CPL-3:** Mampu menguasai konsep teoritis manajemen asuhan/praktik profesional dan penerapan *evidence-based practice*.

Komponen dan Peta Bobot Penilaian

Total

Komponen Evaluasi	Sub-CPMK Relevan	Bobot (%)
Aktivitas Partisipatif (Kehadiran/Diskusi)	Sub-CPMK 1.1 - 3.2	6%
Kuis Terstruktur	Sub-CPMK 1.1 - 3.2	14%
Tugas Kognitif & Analisis Kasus	Sub-CPMK 1.1 - 3.2	26%
Ujian Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK 1.1 - 2.2	20%
Ujian Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK 2.1 - 3.2	25%
Proyek Pembelajaran / Kampanye	Sub-CPMK 3.1 - 3.2	9%
	100%	

BAB 1: HAKIKAT DAN KONSEP DASAR KEWARGANEGARAAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 1.1)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hak dan kewajiban warga negara secara komprehensif, akurat, dan dapat memberikan contoh kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana instruksional yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter (*smart and good citizen*). Secara epistemologis, PKn mengkaji hubungan antara warga negara dengan negara, serta antarwarga negara dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.2 Kedudukan Warga Negara dalam Negara Hukum

Warga negara adalah anggota dari suatu komunitas politik yang dinamakan negara. Sebagai warga negara, individu memiliki status legal yang mengikat yang melahirkan hak-hak subjektif yang wajib dilindungi oleh negara, sekaligus beban kewajiban yang harus ditunaikan demi kelangsungan tatanan publik.

STUDI KASUS KONTEKSTUAL: STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DAN DILEMA KEWAJIBAN

Di era mobilitas global yang tinggi, fenomena kewarganegaraan ganda sering memicu kompleksitas legal-formal, khususnya dalam pemenuhan kewajiban bela negara dan pembayaran pajak. Bagaimanakah prinsip kepastian hukum nasional merespons tantangan integrasi warga negara dalam ikatan kebangsaan?

Ringkasan Materi Bab 1

PKn mendasarkan hakikatnya pada pembentukan karakter bangsa. Keseimbangan antara status formal warga negara dan partisipasi aktif menjadi fondasi utama kelangsungan negara demokratis berbasis hukum.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Jelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di Perguruan Tinggi!
2. Analisis hubungan timbal balik antara status legal warga negara dan kewajiban moral terhadap keutuhan NKRI!

BAB 2: PANCASILA SEBAGAI KEDUDUKAN & DASAR NEGARA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 1.1)

Mahasiswa mampu memahami dan menguraikan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta Staatsfundamentalnorm dalam tata hukum Indonesia.

2.1 Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm

Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menempati hirarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seluruh pembentukan hukum positif tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

2.2 Fungsi Pancasila dalam Ideologi Berbangsa

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Pancasila mampu menyerap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya, menjadikannya pemersatu di tengah kemajemukan suku, agama, dan budaya di Indonesia.

STUDI KASUS: PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA

Proses *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bagaimana sila-sila Pancasila digunakan sebagai batu uji utama dalam menilai apakah sebuah norma hukum memihak pada keadilan sosial atau justru mencederai hak konstitusional warga negara.

Ringkasan Materi Bab 2

Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan landasan etis-filosofis dan legal yang menuntun segenap arah pembangunan nasional dan kehidupan bermasyarakat.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Mengapa Pancasila disebut sebagai norma dasar yang tidak dapat diubah oleh lembaga manapun? Jelaskan argumen yuridisnya!
2. Berikan contoh konkret implementasi sila ke-5 dalam pelayanan kesehatan masyarakat!

BAB 3: KONSEP DAN IMPLEMENTASI HAK WARGA NEGARA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 1.2)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis implementasi hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

3.1 Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hak warga negara merupakan hak yang melekat pada diri seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota suatu negara, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak-hak ini dalam Pasal 27 hingga Pasal 34.

3.2 Implementasi Hak dalam Sektor Pelayanan Publik

Jaminan atas hak sipil dan sosial diwujudkan melalui penyediaan layanan publik yang inklusif, nondiskriminatif, dan akuntabel, seperti pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara.

STUDI KASUS: PEMERATAAN AKSES KESEHATAN DI DAERAH DISABILITAS DAN TERPENCIL

Meskipun hak atas kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, ketimpangan fasilitas kesehatan di wilayah 3T (Disabilitas, Terdepan, Terluar) masih menjadi tantangan nyata dalam penegakan hak warga negara.

Ringkasan Materi Bab 3

Pemenuhan hak warga negara merupakan tolak ukur keberhasilan penegakan hukum dan keadilan sosial suatu negara demokratis.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Uraikan perbedaan mendasar antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Warga Negara (HWN)!
2. Bagaimana strategi pengawasan publik terhadap pelayanan kesehatan agar hak-hak masyarakat terjamin?

BAB 4: KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN WARGA NEGARA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 1.2)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban warga negara serta dampaknya terhadap keseimbangan tatanan bermasyarakat.

4.1 Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Harmoni kehidupan bermasyarakat ditentukan oleh kesadaran warga negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya sebelum menuntut hak-haknya secara mutlak.

4.2 Jenis-Jenis Kewajiban Konstitusional

Kewajiban konstitusional mencakup kewajiban menaati hukum dan pemerintah (Pasal 27 ayat 1), kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat 3), serta kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J).

STUDI KASUS: KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kewajiban membayar pajak merupakan bentuk keterlibatan langsung warga negara dalam membiayai fasilitas umum dan pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan pajak sering kali diuji oleh isu transparansi anggaran.

Ringkasan Materi Bab 4

Kewajiban warga negara adalah bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan, ketertiban, dan kedaulatan negara.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Jelaskan konsekuensi sosiologis dan legal jika terjadi ketidakseimbangan antara penuntutan hak dan pemenuhan kewajiban!
2. Sebutkan 3 bentuk kewajiban warga negara di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan!

BAB 5: ANALISIS DAMPAK DAN ISU KORUPSI DI INDONESIA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 2.1)

Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) serta dampaknya terhadap multidimensi kehidupan.

5.1 Hakikat dan Faktor Inisiator Korupsi

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi terjadi akibat interaksi antara faktor internal (greed, kebutuhan, gaya hidup) dan faktor eksternal (sistem yang lemah, pengawasan minim, budaya kompromis).

5.2 Dampak Multidimensi Korupsi

Korupsi merusak fondasi ekonomi, melumpuhkan pelayanan publik, merusak nilai-nilai demokrasi, serta memperdalam jurang kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

STUDI KASUS: DAMPAK KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN

Penyalahgunaan pengadaan obat dan alat kesehatan di daerah terpencil langsung berakibat pada menurunnya kualitas layanan medis dan tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Ringkasan Materi Bab 5

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merenggut hak-hak ekonomi dan sosial warga negara serta merusak tatanan keadilan.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Gunakan teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure) untuk menganalisis kasus korupsi pengadaan publik!
2. Bagaimana dampak korupsi terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia?

BAB 6: AKAR MASALAH INTOLERANSI DAN RADIKALISME

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 2.1)

Mahasiswa mampu menganalisis akar penyebab, pola penyebaran, serta potensi ancaman intoleransi dan radikalisme bagi keutuhan NKRI.

6.1 Pengertian Intoleransi dan Radikalisme

Intoleransi adalah sikap ketidakmauan untuk mengakui dan menghormati perbedaan, sedangkan radikalisme dalam konteks sosial-politik adalah paham yang menginginkan perubahan sistemis secara ekstrem dan sering kali menghalalkan cara-cara kekerasan.

6.2 Akar Penyebab dan Kanal Spread

Faktor pematik radikalisme mencakup pemahaman agama yang sempit, rasa ketidakadilan sosial-ekonomi, eksklusivisme kelompok, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana indoktrinasi cepat.

STUDI KASUS: RADIKALISME DIGITAL DI ERA POST-TRUTH

Penyebaran narasi kebencian dan kebohongan (hoax) di media sosial secara terencana terbukti mampu memecah belah kerukunan antarumat beragama dan mengikis rasa solidaritas nasional.

Ringkasan Materi Bab 6

Intoleransi merupakan pintu masuk awal menuju radikalisme dan terorisme yang mengancam konsensus nasional Pancasila.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Jelaskan tahapan eskalasi dari sikap intoleran pasif menuju tindakan radikalisme aktif!
2. Mengapa generasi muda menjadi target utama doktrinasi radikal di media sosial?

BAB 7: STRATEGI KOMPREHENSIF PEMBERANTASAN KORUPSI

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 2.2)

Mahasiswa mampu merumuskan strategi penindakan, pencegahan, dan edukasi dalam rangka perlawanan terhadap tindak pidana korupsi.

7.1 Tiga Trisula Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan terpadu: Penindakan (memberikan efek jera), Perbaikan Sistem (menutup celah korupsi), serta Edukasi dan Kampanye (membangun budaya antikorupsi).

7.2 Peran Mahasiswa dan Integritas Akademik

Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) melalui penerapan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberanian di lingkungan kampus dan masyarakat.

STUDI KASUS: IMPLEMENTATION AUDIT EKSTERNAL DAN PELAPORAN WHISTLEBLOWING

Penggunaan sistem pelaporan pelanggaran anonim (*Whistleblowing System*) di instansi publik terbukti efektif membongkar praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Ringkasan Materi Bab 7

Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Rancanglah sebuah rencana aksi sederhana kampanye antikorupsi di lingkungan perkuliahan!
2. Mengapa perbaikan sistem tata kelola digital (e-budgeting) sangat vital dalam mencegah korupsi?

BAB 8: EVALUASI PARUH SEMESTER (UTS)

UJIAN TENGAH SEMESTER (BOBOT 20%)

Validasi pemahaman kognitif dan analitis atas materi Bab 1 sampai Bab 7 (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 2.1, 2.2).

Panduan Portofolio dan Analisis Kasus UTS

Evaluasi Tengah Semester dirancang untuk mengukur kedalaman analisis kognitif serta pemecahan masalah (*problem solving*) mahasiswa terhadap isu-isu kewarganegaraan, korupsi, dan radikalisme.

Struktur Penilaian UTS

- **Bagian A:** Ujian Pemahaman Konseptual (Pilihan Ganda & Isian Singkat) — Bobot 30%
- **Bagian B:** Analisis Kasus Studi Korupsi & Penegakan Hak Warga Negara — Bobot 40%
- **Bagian C:** Perumusan Solusi Alternatif Masalah Sosial — Bobot 30%

INSTRUKSI TUGAS MANDIRI UTS

Pilihlah satu isu kontemporer terkait pelayanan publik di daerah Anda. Buatlah makalah analisis kasus sepanjang 3-5 halaman yang memuat: Identifikasi Masalah, Analisis Hukum & Pancasila, serta Rekomendasi Solusi Realistik!

BAB 9: STRATEGI PENANGANAN INTOLERANSI & DERADIKALISASI

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 2.2)

Mahasiswa mampu merumuskan gagasan dan strategi preventif serta kuratif dalam mengantisipasi intoleransi dan gerakan radikal.

9.1 Moderasi Beragama dan Dialog Interaktif

Moderasi beragama adalah kunci utama menjaga keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dan penghormatan terhadap keberagaman. Karakter inklusif harus dipupuk melalui ruang-ruang dialog lintas iman dan budaya.

9.2 Program Deradikalisasi dan Counter-Narasi

Penanganan radikalisme memerlukan penguatan narasi kebangsaan (*counter-narration*) di media digital serta reintegrasi sosial bagi individu yang terpapar paham ekstremis.

STUDI KASUS: PROGRAM KAMPUNG KERUKUNAN DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Inisiatif lokal membangun Kampung Kerukunan berhasil menciptakan ruang interaksi positif antarpemeluk agama yang terbukti ampuh meredam potensi konflik horisontal.

Ringkasan Materi Bab 9

Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan merupakan strategi terbaik dalam menangkal radikalisme secara permanen.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Jelaskan indikator-indikator utama seseorang memiliki pemahaman moderasi beragama!
2. Bagaimana cara menyusun narasi tandingan (*counter-narrative*) yang efektif di platform media sosial?

BAB 10: WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 3.1)

Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai persatuan, kesatuan, dan cara pandang geopolitik Indonesia dalam wadah NKRI.

10.1 Konsep Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara mengutamakan persatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan.

10.2 Ketahanan Nasional dan Astagatra

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan. Konsep ini mencakup 8 gatra (Astagatra): Trigatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam).

STUDI KASUS: KETAHANAN NASIONAL DI MASA PANDEMI DAN DISRUPSI GLOBAL

Ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia diuji saat menghadapi krisis kesehatan global, di mana kemandirian pangan dan obat-obatan menjadi aspek vital ketahanan nasional.

Ringkasan Materi Bab 10

Wawasan Nusantara melandasi cara pandang kita terhadap keutuhan NKRI, sedangkan Ketahanan Nasional adalah modal daya tahan bangsa menghadapi segala bentuk ancaman.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Uraikan keterkaitan antara aspek Trigatra dan Panca Gatra dalam membangun Ketahanan Nasional!
2. Mengapa kedaulatan maritim merupakan komponen vital Wawasan Nusantara?

BAB 11: DEMOKRASI INDONESIA: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 3.1)

Mahasiswa mampu menginternalisasi dan menganalisis nilai-nilai Demokrasi Pancasila serta mekanisme elektoral di Indonesia.

11.1 Hakikat Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berjiwa Ketuhanan YME, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial.

11.2 Tantangan Demokrasi dan Pemilu Bersih

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan nyata seperti politik uang (*money politics*), populisme sempit, serta penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam kebebasan sipil dan integritas pemilu.

STUDI KASUS: E-VOTING DAN TRANSPARANSI PERHITUNGAN SUARA

Penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi suara pemilu bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan menekan potensi kecurangan elektoral.

Ringkasan Materi Bab 11

Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekadar kemenangan mayoritas semata.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Jelaskan perbedaan prinsipil antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal/Kapitalis!
2. Bagaimana peran pemilih pemula dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil?

BAB 12: PLURALISME DAN TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 3.2)

Mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleransi, inklusif, dan menghargai keragaman suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

12.1 Realitas Pluralisme Bangsa

Indonesia merupakan negara multikultural dengan ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta beragam kepercayaan. Kebhinekaan ini merupakan kekayaan sekaligus potensi kerawanan jika tidak dikelola dengan baik.

12.2 Etika Bermasyarakat dalam Kebhinekaan

Mengembangkan etika kepedulian, empati sosial, serta saling menghormati simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan merupakan syarat mutlak terciptanya integrasi nasional yang kokoh.

STUDI KASUS: RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS DAN KEARIFAN LOKAL

Penggunaan tradisi kearifan lokal seperti *Pela Gandong* di Maluku terbukti menjadi sarana ampuh merekonstruksi perdamaian pasca-konflik sosial.

Ringkasan Materi Bab 12

Penghormatan terhadap pluralisme adalah pilar penyangga Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin keharmonisan hidup bersama.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Sebutkan dan jelaskan 3 nilai kearifan lokal di Indonesia yang mendukung kerukunan hidup beragama!
2. Bagaimana cara menghindari sikap etnosentrisme di lingkungan kampus yang heterogen?

BAB 13: PERAN WARGA NEGARA DALAM PERUBAHAN SOSIAL

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 3.2)

Mahasiswa mampu menunjukkan sikap adaptif dan berpartisipasi aktif sebagai penggerak perubahan sosial positif di masyarakat.

13.1 Pengertian Perubahan Sosial dan Disrupsi

Perubahan sosial terjadi secara kontinyu akibat perkembangan teknologi, kebudayaan, serta kondisi ekonomi. Generasi muda dituntut menjadi pembawa arah perubahan yang *constructively* berakar pada karakter bangsa.

13.2 Kewirausahaan Sosial dan Pengabdian Masyarakat

Partisipasi warga negara tidak hanya dalam bidang politik formal, tetapi juga dalam bentuk kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dan advokasi kesehatan/kesejahteraan masyarakat.

STUDI KASUS: INOVASI DIGITAL UNTUK AKSES LAYANAN KESEHATAN DESA

Gerakan pemuda mengkreasikan platform digital lokal untuk menghubungkan tenaga bidan desa dengan calon ibu hamil dalam mereduksi angka stunting.

Ringkasan Materi Bab 13

Keterlibatan warga negara secara adaptif dan inovatif merupakan motor penggerak transformasi sosial menuju masyarakat adil dan makmur.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Bagaimana mahasiswa dapat mengambil peran sebagai *agent of change* dalam menangani masalah kesehatan di daerah sekitar?
2. Jelaskan hubungan antara inovasi teknologi dan penguatan karakter kewarganegaraan!

BAB 14: PARTISIPASI PUBLIK DAN SISTEM BELA NEGARA

CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 3.2)

Mahasiswa mampu menginternalisasi kesadaran Bela Negara serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan.

14.1 Konsep Modern Bela Negara

Bela negara di era modern tidak terbatas pada pengangkatan senjata (militer), melainkan mencakup profesi, kontribusi pemikiran, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi nasional (non-militer).

14.2 Formas Partisipasi Publik

Partisipasi publik dilakukan melalui pengawasan kebijakan, keterlibatan dalam organisasi non-pemerintah, serta aksi kemanusiaan dan kebencanaan.

STUDI KASUS: PERAN SUKARELAWAN KESEHATAN SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA

Keterlibatan mahasiswa dan tenaga profesional medis dalam penanganan bencana alam merupakan manifestasi konkrit semangat Bela Negara sesuai keahlian profesi.

Ringkasan Materi Bab 14

Bela Negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang diwujudkan melalui pengabdian berkesadaran tinggi demi kejayaan NKRI.

Latihan Soal & Evaluasi Mandiri

1. Berikan 3 contoh konkrit perwujudan Bela Negara non-fisik bagi mahasiswa profesi kesehatan/vokasi!
2. Mengapa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan negara sangat krusial bagi negara hukum?

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun menggunakan standar American Psychological Association (APA) 6th/7th Edition sesuai dengan standar akreditasi dan RPS Mata Kuliah Kewarganegaraan.

Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI.

Mahfud MD, M. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

National Counter Terrorism Agency (BNPT). (2021). *Strategi Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi*. Jakarta: BNPT RI.

Notonagoro. (1995). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prasetyo, H., & Nugraha, P. P. (2023). *Inovasi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Perguruan Tinggi Vokasi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(2), 145-158.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2018). *Panduan Pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Sudargono, A. (2019). *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Dinamika Geopolitik Global*. Bandung: Alfabeta.

Syarbaini, S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.